

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah panjang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kaum perempuan dan kaum laki-laki, mereka bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa Indonesia menuju titik kemajuan. Salah satu peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah perjuangan oleh kaum perempuan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Perempuan Indonesia sendiri telah mengambil peran penting dalam perjuangan perjalanan bangsa yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Bila diperhatikan pada awal abad ke-20 merupakan sebuah awal abad di mana semangat untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan mulai bangkit. Hal ini diawali dengan adanya politik etis yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901 yang telah membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia, salah satu program politik etis yang memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat kolonial adalah tentang edukasi atau pendidikan. Poesponegoro dan Nugroho (2010, hlm. 411) mengemukakan bahwa “salah satu faktor pendorongnya adalah pendidikan Barat yang menghasilkan elite baru dalam masyarakat kolonial yang disebut elite modern”. Di mana “Pendidikan dinilai sebagai jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib rakyat, karena dengan adanya perbaikan pendidikan maka nasib rakyat akan menjadi lebih baik” (Wahyu, 2014, hlm. 1). Diketahui bahwa politik etis membawa pengaruh positif bagi pemerintah kolonial Belanda maupun rakyat Bumiputera, pengaruh politik etis tentang pendidikan antara lain menurut Depdikbud (1984) ialah:

- (1) Pendidikan lebih luas tidak hanya untuk lapisan atas saja tetapi juga lapisan bawah agar orang-orang Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat yang sampai saat itu diduduki oleh orang-orang Belanda. Selain itu keuntungan dari pihak pemerintah kolonial Belanda lebih mudah mencari orang-orang yang cakap dan terampil untuk dipergunakan sebagai pegawai bawahan di kantor-kantor dan perusahaan Belanda;
- (2) kemajuan bagi bahasa dan kebudayaan Barat, karena kesempatan untuk belajar bahasa Belanda diperluas. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Belanda merupakan kunci memasuki

Ridha Laeli Insyarah Anwar, 2019

*Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dunia kerja pada waktu itu; (3) jumlah sekolah-sekolah diperbanyak dan tersebar di seluruh Indonesia (hlm. 61).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem pendidikan berupa sekolah-sekolah diperbanyak oleh pemerintah kolonial Belanda agar setiap rakyat Bumiputera mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat sampai setinggi-tingginya. Namun dalam kenyataannya masyarakat di Indonesia pada tahun 1920 dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (Cina dan Arab), dan golongan Bumiputera. Sehingga sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia tampak jelas adanya perlakuan yang berbeda, sekolah-sekolah pada masa politik etis lebih banyak dimasuki oleh peserta didik dari golongan mayoritas yang berkebangsaan Belanda, golongan Cina, Arab dan orang Bumiputera sebagai golongan minoritas. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas (bangsawan) dan bagi golongan bawah (rakyat biasa). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Cahyani dkk. (2015) yang menyatakan bahwa politik etis ini telah memberikan peranan yang baik dalam pendidikan dan meningkatkan pendidikan umum untuk rakyat. Pernyataannya tersebut adalah seperti berikut:

Melalui politik etis pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Namun, yang lebih mendapatkan pendidikan adalah kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan mendapatkan diskriminasi dan keterbatasan untuk memperoleh akses pendidikan. Akses pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dibagi dalam lapisan kelas sosial masyarakat yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas diperuntukkan kalangan aristokrat atau keturunan bangsawan, sedangkan lapisan bawah diperuntukkan rakyat jelata (hlm. 2).

Realitanya untuk dapat memasuki sekolah-sekolah tertentu masih dipersulit dengan aturan-aturan yang memberatkan, ditambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghalangi rakyat biasa memasuki sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak Eropa, sehingga bagi rakyat Bumiputera terutama rakyat biasa hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Selain itu, akses pendidikan bagi kaum

perempuan yang juga sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda, hal ini karena pemerintah kolonial menganggap bahwa kaum perempuan Indonesia tidak selayaknya dan sepatutnya untuk mendapatkan pendidikan. Akibat dari adanya diskriminasi dan keterbatasan pendidikan tersebut, menjadikan kaum perempuan bangkit untuk memperoleh fasilitas pendidikan.

Kaum perempuan pada masa penjajahan Belanda juga belum mendapatkan hak yang sama dalam bidang politik dan hak pilih. Pada masa ini, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, artinya kedudukan perempuan-perempuan Indonesia berada di bawah kedudukan kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan sejarah yang mencatat dalam kebudayaan Jawa, bahwa perempuan sering ditempatkan sebagai “*the second sex*” (Nugroho, 2011, hlm. 43). Hal tersebut tercermin dari ungkapan Jawa *swarga nunut neraka katut*, yang berarti kebahagiaan atau penderitaan istri tergantung kepada suaminya. Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa peran seorang perempuan dalam suatu keluarga hanya sebagai pendukung saja, keadaan yang demikian menyebabkan seorang istri akan patuh kepada suaminya terlebih ketika suami membawa perempuan lain ke rumah untuk dinikahi. Istri akan cenderung menerima hal tersebut meskipun secara harfiah mereka menderita. Rendahnya pendidikan dan kurangnya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri membuat kaum perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum perempuan cenderung bergantung kepada suami mereka, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan seorang istri akan menerima hal tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan kaum perempuan baik dalam keluarga dan masyarakat menjadi rendah, sistem adat feodal seperti inilah yang hanya menguntungkan kaum laki-laki dan merupakan penindasan bagi kaum perempuan. Selain itu, adanya adat istiadat yang juga menghalangi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Anak-anak perempuan banyak yang tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di dalam rumah.

Keadaan inilah yang menimbulkan semangat dan usaha mengenai perbaikan nasib bangsa Indonesia mulai berkembang pada awal abad ke-20. Perbaikan nasib diusahakan berdasarkan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya ketimpangan sosial atas kolonisasi dan adat-istiadat yang melanggar hak asasi manusia. Usaha perbaikan atas kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan, sejatinya harus berasal dari kaum perempuan itu

sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suryochondro (1984), yang mengemukakan bahwa:

Sudah selayaknya bahwa keinginan dan dorongan untuk memajukan wanita berasal dari kaum wanita sendiri. Mereka tidak lagi merasa puas dengan cara hidup yang terbatas yang diisi dengan kewajiban-kewajiban untuk keluarga dan rumah tangga saja; mereka ingin memperoleh kebebasan dan bekerja di lingkungan yang lebih luas. Juga dialami ketidakadilan dalam adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan seperti kawin paksa, sistem poligami, sistem *selir*, ditambah dengan adanya sistem *nyai* dalam masyarakat kolonial. Di lapangan pekerjaan pun dirasakan ketidakadilan dengan adanya berbagai diskriminasi, misalnya mengenai upah buruh wanita yang bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik (hlm.79).

Hal ini yang menjadikan dorongan untuk memajukan kaum perempuan yang berarti hilangnya hambatan-hambatan agar mendapat kesempatan mengembangkan jiwanya, mendapatkan pendidikan sekolah dan bekerja di luar rumah tangga dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya. Cara hidup demikian dianggap lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan cita-cita perikemanusiaan dan keadilan daripada menurut sistem feodal dan tradisional yang membatasi lingkungan hidup para perempuan. Pendidikan akan menambah kesadaran dan mengembangkan kemampuan yang dapat berguna untuk kemajuan masyarakat khususnya perempuan. Bukan lagi pendidikan yang dilakukan dalam kalangan keluarga saja mengenai sopan santun, sikap hidup dan kerumahtanggaan, melainkan pendidikan sekolah dengan pelajaran yang lebih luas. Urifatulailiyah (2017) mengatakan bahwa:

Sejak diserukannya pemikiran mengenai perbaikan perempuan melalui pendidikan yang dikumandangkan oleh pelopor pergerakan nasional baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, akhirnya mulai muncul persatuan pergerakan oleh kaum perempuan dan mereka mulai berani bergerak keluar dari peran domestiknya untuk lebih berkembang membentuk suatu perkumpulan-perkumpulan (hlm. 1490).

Dalam perkembangannya cita-cita kaum perempuan untuk bangkit mendapatkan dan memperjuangkan hak pendidikan salah satunya adalah melalui kesadaran untuk berorganisasi atau berkumpul dengan

Ridha Laeli Insyarah Anwar, 2019

*Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

cara membentuk organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Golongan terpelajar menganggap bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memajukan masyarakat khususnya bagi perempuan, mereka mulai sadar bahwa perempuan mempunyai peran yang penting karena perempuan juga berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada masa awal pergerakan bangsa Indonesia, pergerakan perempuan berfokus pada perjuangan untuk mempertinggi kedudukan sosial yang merupakan perlawanan terhadap kekuasaan kaum laki-laki (diantaranya kawin paksa dan poligami). Bergerak untuk perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan perempuan. Gerak maju kaum perempuan ini dilakukan dengan tidak merongrong kedudukan kaum laki-laki dan melawan penjajah. Geraknya pun gerak perorangan, tidak dalam susunan perkumpulan hal ini diperlihatkan R.A Kartini, Dewi Sartika dan tokoh lainnya. Kemudian beralih kepada gerakan kelompok, Menurut Lopian dkk. (2012) bahwa:

Organisasi formal perempuan yang berkembang sebelum tahun 1920 adalah Putri Mardika tahun 1912 dan pada tahun 1913-1915 berdiri berbagai organisasi perempuan, terutama di Jawa dan Minangkabau dengan fokus perhatian organisasi-organisasi ini adalah mendobrak penjara rumah tangga yang telah membuat mereka terkurung bagai burung (hlm.367).

Organisasi perempuan ini lebih menekankan perjuangan pada perbaikan kedudukan sosial dalam pernikahan, keluarga, dan peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan pendidikan dan pengajaran serta peningkatan keterampilan khusus perempuan. Timbulnya pergerakan perempuan merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial dan pendidikan. Awal mulanya kebangkitan pergerakan perempuan melalui organisasi hanya berada di lapisan atas, tetapi kemudian dalam perkembangannya makin meluas ke lapisan bawah karena organisasi-organisasi yang dibentuk tersebut bertujuan sama, memberi pendidikan bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi cerdas, terampil, dan mandiri. “Organisasi-organisasi pada masa ini bersifat umum dan sukarela, dalam arti bahwa kaum perempuan pada umumnya asal memenuhi syarat umur, kewarganegaraan dan menyetujui tujuan

organisasi dapat menjadi anggota atas permintaan sendiri” (Suryochondro, 1984, hlm. 130).

Seiring meningkatnya pendidikan pada kalangan masyarakat, pada tahun 1920-an perkumpulan perempuan pun bertambah, salah satunya adalah perkumpulan perempuan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Sutartinah yang merupakan istri dari Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdirilah Perguruan Tamansiswa oleh Suwardi Suryaningrat. Kelahiran Perguruan Tamansiswa disebabkan karena keadaan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu sangat kurang dan sangat mengecewakan (Soeratman, 1983, hlm. 86). Seperti yang diketahui, sesudah pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis dalam hal ini sistem pendidikan, jumlah sekolah yang didirikan bertambah banyak. Akan tetapi jumlah sekolah dibanding dengan jumlah anak usia sekolah sangat jauh dari cukup, lagi pula sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kolonial dan sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat Bumiputera.

Terdapat sebagian kecil dari rakyat kita yang diperkenankan menuntut pelajaran di sekolah dasar Belanda, yaitu kaum priyayi sehingga mereka dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatannya. Maka karena hal tersebut didirikanlah Perguruan Tamansiswa, di mana “Dasar pemikiran dalam segala usaha di bidang pendidikan dan organisasi Tamansiswa menurut Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah “Demokrasi dan Kepemimpinan” (Muljana, 2008, hlm. 103). Artinya menurut Suhartono (1994, hlm. 66) “bahwa organisasi Tamansiswa itu mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah merupakan “jiwa zaman” pemimpin yang selalu “manunggal” dengan rakyat adalah pemimpin yang mempunyai kunci keberhasilan dalam pergerakan”. Dengan menggunakan dasar kekeluargaan Tamansiswa tidak hanya menghendaki pembentukan intelek, tetapi juga dan terutama pendidikan dalam arti pemeliharaan dan latihan asusila. Artinya bahwa “mengenai dasar pendidikan Tamansiswa adalah dasar kemanusiaan, dan kebangsaan itu hanya diartikan ujudnya, jadi sifat lahirnya saja. oleh sebab itu maka adab kemanusiaan lebih diutamakan dari adab kebangsaan. Syarat kebangsaan yang berlawanan dengan syarat kemanusiaan harus dibatalkan” (Soeratman, 1984, hlm. 97).

Lingkungan Tamansiswa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Tamansiswa, sebagai suatu organisasi yang bersifat

kekeluargaan menganggap perlu hadirnya golongan perempuan untuk bersama-sama membawa maju Tamansiswa. Maka dari itu, istri dari Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Ajeng Sutartinah membina gerakan perempuan Indonesia lewat organisasi baru yaitu Wanita Tamansiswa. Di sini beliau menjabat sebagai ketua sekaligus anggota badan penasehat pemimpin umum, beliau mengambil bagian untuk dapat memperbaiki nasib kaum perempuan disekitarnya. Jiwa perjuangan dan cita-cita kemerdekaan Raden Ajeng Sutartinah bukanlah barang cetakan. Jiwa dan cita-citanya merupakan sesuatu yang tumbuh secara wajar di dalam pribadinya, sesuai dengan zaman yang melahirkannya, dengan ajaran-ajaran yang diterima, dan sesuai pula dengan kemampuan pribadinya dalam menyerap dan memanfaatkan segala pengalaman hidupnya.

Alasan penulis ingin mengkaji mengenai Raden Ajeng Sutartinah: pelopor organisasi Wanita Tamansiswa tahun (1922-1971). *Pertama*, Judul ini dipilih karena penulis memiliki ketertarikan pribadi terhadap pergerakan perempuan khususnya tokoh perempuan Raden Ajeng Sutartinah yang memiliki kontribusi dan peran dalam memperhatikan permasalahan hak perempuan terutama dalam hal organisasi dan perempuan di Indonesia pada masa pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. “Pemikirannya tentang memperjuangkan hak-hak perempuan terutama soal pendidikan dan perempuan ia realisasikan ke dalam sebuah organisasi Wanita Tamansiswa yang bertujuan untuk memperbaiki nasib perempuan Indonesia” (Cahyani, dkk, 2015, hlm. 10).

*Kedua*, sebagian orang belum banyak mengenal nama Raden Ajeng Sutartinah, yang merupakan istri dari seorang tokoh bangsa Suwardi Suryaningrat atau lebih banyak dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Padahal ia mempunyai peranan yang besar dalam andil menyukseskan suaminya dan Perguruan Tamansiswa. Raden Ajeng Sutartinah atau lebih dikenal dengan sebutan Nyi Hajar Dewantara adalah sosok istri hebat yang senantiasa mendukung dan menjaga langkah-langkah perjuangan suaminya. “*There’s always a tough woman behind great man*”. Ungkapan tersebut cukup akrab di telinga bahwa dalam sebuah rumah tangga, sosok seorang istri tangguh sangat berpengaruh terhadap hebatnya suami sekaligus menjadi penentu kesuksesannya. Sehingga, ungkapan tersebut cocok untuk menggambarkan peran Raden Ajeng Sutartinah dalam menyukseskan suaminya. Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Sutartinah bersama-sama berjuang dalam bidang organisasi dan pendidikan, keduanya berjuang untuk memajukan bangsa

ini. Di mana fokus dari penelitian ini adalah mengenai Raden Ajeng Sutartinah yang memperjuangkan hak berorganisasi untuk perempuan dengan jalan tanpa keluar dari kodratnya sebagai seorang perempuan dan juga perjuangan yang dilakukan tanpa membawa embel-embel nama besar suaminya yaitu Ki Hajar Dewantara.

*Ketiga*, keputusan penulis untuk membahas tentang peranan Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan bertujuan untuk menambah wawasan sejarah perjuangan kaum perempuan dalam penulisan sejarah di Indonesia yang agak terpinggirkan. Bukan karena mereka tidak ada namun kalah oleh banyaknya tulisan tentang peranan kaum laki-laki. Artinya tulisan sejarah di Indonesia bisa dikatakan masih bersifat *male domain*, dimana laki-laki selalu menjadi tokoh utama dan perempuan sebagai pemeran pembantu. Menurut sejarawan Kuntowijoyo, “sejarah yang ditulis dengan kaum laki-laki sebagai tokoh utama dan perempuan sebagai pemeran pembantu adalah sejarah yang masih bercorak *androcentric*” (Kuntowijoyo, 2003, hlm.115). Tulisan sejarah yang *gynocentric* masih harus terus dikembangkan dengan mengambil berbagai tema diantaranya perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya, biografi perempuan, atau tentang gerakan perempuan. “Tulisan sejarah yang *gynocentric* setidaknya harus menempatkan perempuan sebagai tokoh utama” (Jazimah, 2016, hlm. 47-48).

*Keempat*, adapun alasan penulis mengambil rentang waktu tahun 1922-1971 sebagai batasan kajian penelitian, didasarkan pada beberapa hal. Diawali tahun 1922 dikarenakan tahun tersebut merupakan langkah awal Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak untuk perempuan yang sudah terkoordinasi dalam suatu wadah organisasi yaitu membentuk organisasi Wanita Tamansiswa dan diakhiri dengan tahun 1971 karena pada tahun ini Raden Ajeng Sutartinah meninggal dunia di rumah sakit Pati Rapih Yogyakarta, sehingga beliau tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya yang sampai akhir hayatnya masih menjabat sebagai Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa.

Berdasarkan uraian permasalahan dan alasan yang telah dikemukakan di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan Raden Ajeng Sutartinah pada organisasi yang dibentuknya. Maka penulis mencoba merumuskannya dalam sebuah judul penelitian yakni **Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-1971)**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Ridha Laeli Insyarah Anwar, 2019

*Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya terdapat satu permasalahan utama yang akan dikaji yaitu “*Bagaimanakah upaya Raden Ajeng Sutartinah dalam memelopori dan mengembangkan organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1922-1971?*”. Untuk mempermudah dan mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah ke dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Raden Ajeng Sutartinah?
2. Apakah yang melatarbelakangi Raden Ajeng Sutartinah mendirikan organisasi Wanita Tamansiswa pada tahun 1922-1931?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Raden Ajeng Sutartinah dalam mengembangkan organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1922-1971?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami “Peranan Raden Ajeng Sutartinah pada Perkembangan Organisasi Wanita Tamansiswa Tahun 1922-1971”. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang kehidupan Raden Ajeng Sutartinah.
2. Untuk menjelaskan yang melatarbelakangi Raden Ajeng Sutartinah mendirikan organisasi Wanita Tamansiswa pada tahun 1922-1931.
3. Untuk menjelaskan upaya Raden Ajeng Sutartinah dalam mengembangkan organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1922-1971.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penulisan skripsi ini secara khusus untuk memperkaya penelitian dan penulisan sejarah terutama dalam penulisan sejarah dibidang peranan perempuan dalam sejarah bangsa Indonesia. Maka, disusunlah manfaat dari penelitian skripsi ini ialah:

- 1) Menambah informasi dan pengetahuan tentang kehidupan Raden Ajeng Sutartinah mulai dari latar belakang kehidupannya.
- 2) Menambah informasi yang lebih jelas tentang peranan Raden Ajeng Sutartinah pada perkembangan organisasi Wanita Tamansiswa.
- 3) Memberikan kontribusi bagi Universitas Pendidikan Indonesia khususnya bagi Departemen Pendidikan Sejarah dalam

memperkaya penulisan historiografi perempuan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

- 4) Bagi dunia pendidikan dapat dijadikan bahan materi ajar pada kelas XI Wajib sejarah Indonesia untuk Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisannya akan disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Latar belakang masalah sendiri merupakan alasan mengapa penulis memilih judul “Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-1971)” layak untuk dijadikan penelitian. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan perumusan dan pembatasan masalah sehingga permasalahan dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Dan pada bagian akhir dari bab ini akan dimuat pula sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

BAB II, Kajian Pustaka. Pada bab ini akan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis. Melalui kajian pustaka ini akan diuraikan tentang literatur yang diambil oleh penulis yang relevan dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Selain itu, di sini akan dijelaskan pula tentang penelitian-penelitian atau kajian-kajian terdahulu yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan topik yang diteliti dalam penelitian penulis.

BAB III, Metodologi Penelitian. Pada bab ini merupakan bagian yang bersifat prosedural yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana penulis merancang alur penelitiannya. Di dalam bab ini tentu saja penulis menggunakan metode penelitian sejarah, langkah-langkah nya terdiri dari Heuristik (pengumpulan sumber), kritik terhadap sumber yang telah dicari dan dikumpulkan, dan langkah terakhir yaitu tahap penulisan atau historiografi. Dari setiap langkah yang ditempuh nantinya akan dipaparkan lebih rinci lagi sesuai dengan keadaan di lapangan.

BAB IV, Pembahasan. Pada bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun judul Bab IV yang rencananya akan ditulis oleh penulis yaitu Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-1971).

BAB V, Simpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Simpulan dalam Bab V ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.